

Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia

Azyumardi Azra

Guru Besar Sejarah dan Peradaban UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Azyumardiazra1@gmail.com

Abstract

This article discusses two faces of Islam, political and cultural, which have developed throughout the Muslim world, including Indonesia. The author argues that political Islam has two faces, both of which, although represented by two different groups, have the same agenda - the application by the state of shari'a and the establishment of an Islamic state. Arguing that political Islam has brought about radicalism, the article proposes that the other face of Islam, that is cultural Islam, should be maintained and empowered.

Abstrak

Paper ini mencoba mendiskusikan tentang dua wajah Islam, yaitu Islam Kultural dan Islam Politik, yang berkembang di berbagai belahan dunia Muslim termasuk Indonesia. Penulis berargumen bahwa Islam politik di Indonesia memiliki dua bentuk yang, meskipun direpresentasikan oleh dua kelompok Muslim yang berbeda, mempunyai agenda yang sama, yaitu, penerapan hukum Islam secara formal oleh negara, dan pendirian negara Islam (negara berdasarkan syariat Islam). Menyimpulkan bahwa Islam politik dengan agendanya tersebut telah, dalam batas-batas tertentu, melahirkan radikalisme, penulis menegaskan dan menawarkan bahwa wajah Islam yang lain, yaitu Islam kultural, harus dipertahankan dan dikembangkan di Indonesia.

Kata kunci: Islam, *political Islam*, dan DI/TII

Pendahuluan

Political Islam dan *cultural Islam* merupakan dua istilah populer yang berkembang di dunia Islam, termasuk Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dan Malaysia, *political Islam* lebih populer dengan istilah *Islam politik*, yang umumnya diperhadapkan dengan *cultural Islam* atau *Islam kultural*. Penggunaan dua istilah ini menunjukkan adanya dua jenis Islam, yaitu: Islam politik dan Islam kultural. Yang dimaksud dengan Islam politik adalah Islam yang memiliki orientasi yang kuat kepada politik dan kekuasaan; sebaliknya, Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari kehidupan Islami melalui jalur non-politik, seperti

dakwah Islam secara damai atau melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya.

Dalam konteks keindonesiaan, istilah Islam politik berkembang ketika Snouck Hurgronje menjadi penasihat pemerintah di Hindia Belanda khususnya pada perempatan terakhir abad ke 19.¹ Ia membagi Islam politik dan Islam ibadah atau Islam ritual. Bagi pemerintah Belanda, keberadaan Islam politik harus dibatasi. Sebab, Islam semacam ini memiliki tujuan mengakhiri penjajahan Belanda dan menggantinya dengan politik pan-Islam semacam kekhilafahan. Karena itu, menurut Snouck Hurgronje, perkembangan Islam politik harus ditekan karena dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Sedangkan Islam ibadah atau Islam ritual—yang kemudian pada konteks kekinian disebut dengan istilah Islam kultural, sangat berbeda dengan Islam politik. Menurut Snouck Hurgronje, pemerintah justru harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi Islam ritual—dalam hal ini Islam kultural—atau membiarkan Islam kultural berkembang dengan sendirinya.

Dua Wajah Islam Politik

Berkaitan dengan isu Islam politik di Indonesia, hemat saya, politik Islam dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Islam politik yang direpresentasikan partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan proses politik yang sah; mereka berusaha mencapai agenda politik tertentu seperti penerapan syariah Islam dan pendirian negara Islam. Di Indonesia, Islam politik semacam ini pada 1950-an direpresentasikan Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan sejumlah partai-partai Islam *gurem*. Pada masa pemerintahan Soeharto, Islam politik diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pada masa pasca Soeharto direpresentasikan sejumlah partai politik Islam baru seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain.²

Kedua, Islam politik yang ditampilkan beberapa kelompok atau organisasi Muslim yang memiliki agenda politik yang hampir sama dengan kelompok pertama. Hanya saja, kelompok atau organisasi ini bukan merupakan partai politik, karena mereka tidak mengakui keabsahan sistem dan proses politik yang ada. Mereka juga tidak mempercayai partai politik Islam maupun organisasi sosial keagamaan Islam kultural yang merupakan *mainstream* Islam di Indonesia. Bagi mereka, partai politik dan organisasi Islam arus utama yang

¹Lihat H Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985); Karel Steenbrink, *Dutch Colonialism and Islam: Contacts and Conflicts, 1596-1950* (Amsterdam-Atlanta: Radopi, 1993).

²Lihat Azyumardi Azra, "The Megawati Presidency: The Challenge of Political Islam" dalam Hadi Soesastro, Anthony L. Smith & Han Mui Ling (ed.), *Challenges Facing the Megawati Presidency* (Singapore: ISEAS, 2003).

moderat terlalu banyak mengakomodasi dan berkompromi dengan apa yang mereka anggap sebagai sistem dan proses politik yang tidak Islami.

Islam politik kelompok kedua ini berkembang Timur Tengah, Asia Tenggara dan negara-negara Muslim lain di dunia. Di Indonesia, pada masa pasca kemerdekaan pada 1950-an dan 1960-an, Islam politik radikal sebagian besar direpresentasikan beberapa kelompok, misalnya Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII). Kelompok ini independen dari organisasi-organisasi Muslim *mainstream* yang ada di Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan melawan pemerintah Indonesia dalam usaha mereka mendirikan Negara Islam Indonesia dengan menumbangkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Islam politik semacam ini juga muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari sisa-sisa kelompok pemberontak DI/NII yang telah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Beberapa yang lain merupakan kelompok relatif lebih baru yang terinspirasi perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, atau di beberapa negara Muslim khususnya yang melawan kebijakan politik Barat. Pembentukan kelompok-kelompok Islam politik kedua ini diilhami kesuksesan revolusi di Iran pada 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Peristiwa sejarah sangat penting ini menjadi inspirasi terbentuknya kelompok Islam politik kedua tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Sementara di Indonesia, rezim Soeharto memberikan kepada mereka label 'kelompok subversif' yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaan selama 32 tahun membebaskan kelompok kedua kategori Islam politik. Euforia demokrasi, pemberlakuan kebebasan pers, pembebasan tahanan politik dan pencabutan Undang-undang Anti-Subversi oleh Presiden BJ Habibie—yang menggantikan Presiden Soeharto—memberikan kesempatan sangat luas bagi kelompok ini mengekspresikan wacana dan gerakan ekstrim dan radikal; mereka kini dengan bebas dapat melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Kelompok ini terkadang main hakim sendiri, melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok Islam yang mereka anggap menyimpang. Dalam banyak kasus mereka sangat leluasa, karena kurangnya penegakan hukum oleh Polisi Republik Indonesia—yang juga tengah menghadapi masalah baik kredibilitas dan bahkan semacam demoralisasi setelah berpisah dengan TNI di dalam ABRI.

Beberapa kelompok Islam politik jenis kedua yang pernah muncul, antara lain; Lasykar Jihad (LJ) yang didirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah (FKASWJ) di bawah pimpinan Ja'far Umar Thalib; Front Pembela Islam (FPI) dipimpin Habib Rizieq Syihab; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

pimpinan Abu Bakar Baasyir; Jama'at Ikwanul Muslimin Indonesia (JAMI) di bawah pimpinan Habib Husein al-Habsyi; dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)³ Penting dikemukakan, beberapa kelompok tersebut kemudian dibubarkan pemimpinnya sendiri—seperti Lasykar Jihad—atau menghilang atau meredam aktivitasnya setelah terjadi sejumlah penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku bom Bali dan beberapa bom lainnya di Indonesia sejak akhir 2002.

Sangatlah jelas, kelompok Islam politik ini merupakan kelompok yang independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan organisasi-organisasi Islam *mainstream* seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU); dan mereka juga tidak berafiliasi dengan partai politik Islam, seperti PPP, PBB dan PKS. Hal ini mengindikasikan, kelompok Islam politik semacam ini tidak mempercayai organisasi Muslim, baik organisasi sosial keagamaan ataupun organisasi politik. Karena, dalam pandangan kelompok-kelompok ini, organisasi Islam arus utama terlalu akomodatif dan kompromistis terhadap realitas politik dan agama di Indonesia.

Bagi saya, kelompok politik Islam radikal dilihat dari asal muasal pertumbuhannya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok radikal yang pada dasarnya tumbuh dan berkembang (*home-grown*) di Indonesia; di antaranya Lasykar Jihad—yang sudah membubarkan diri; FPI, dan beberapa kelompok lain yang lebih kecil. Kedua, kelompok yang bersumber dari Timur Tengah (*Middle East origin*)—atau berorientasi kepada organisasi-organisasi Timur Tengah, seperti JAMI yang berasal dari al-Ikhwana-Muslimin di Mesir, dan Hizbut Tahrir, yang pada awalnya didirikan Syaikh Taqi al-Din Nabhani di Yordania pada 1950-an.

Semua kelompok Islam politik radikal memiliki orientasi ideologis dan praksis gerakan-gerakan 'Islamis' (*Islamiyyun*) di Timur Tengah yang sangat mereka percayai sebagai dunia Islam yang sejati. Sehingga, dalam hal pandangan keagamaan, mereka menganut ideologi salafi radikal, yaitu mewujudkan Islam yang 'murni' seperti dipraktekkan kaum Salaf—para sahabat Nabi dan *thabi'in*. Dan dari segi pandangan politik, mereka menganut ideologi khilafatisme yang di antara tujuan terpentingnya adalah pendirian entitas politik khilafah universal bagi seluruh Muslim di dunia. Selanjutnya,

³Lihat Chaider S Bamualim, et al., 2001, *Laporan Penelitian Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2001); Zainuddin Fananie, Atika Sabardila & Dwi Purnanto, *Radikalisme Agama & Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation, 2002); Jamhari Makruf & Jahroni, Jajang (ed.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004); Bahtiar Effendy & Soetrisno Hadi (ed.), *Agama dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: Nuqtah, 2007); Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007).

dengan adanya Khilafah universal ini adalah pengakuan syari'ah secara menyeluruh.

Dinamika Islam Politik Radikal

Organisasi teroris yang paling terkenal di Asia Tenggara, tidak diragukan lagi, adalah al-Jamaah al-Islamiyah (JI). JI terdaftar di antara sejumlah organisasi teroris dunia, dan disebut memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Kita mengetahui bahwa sejumlah anggota JI telah ditahan aparat keamanan di beberapa negara di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lain; dan sebagian di antaranya telah diajukan ke pengadilan karena keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan berbagai aksi pemboman yang terjadi di Indonesia. Bahkan Abu Bakar Baasyir, yang disebut-sebut sebagai pimpinan tertinggi JI, pernah dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada Februari 2005, bukan karena dugaan keterlibatannya dalam terorisme, tapi karena pemalsuan dokumen imigrasi ketika dia kembali ke Indonesia setelah mengasingkan diri di Malaysia pasca-hukuman yang dijatuhkan pengadilan Indonesia di masa Soeharto.⁴

Meskipun polisi dan perangkat hukum lainnya mengajukan berbagai macam bukti tentang kepemimpinannya dalam JI dan dugaan keterlibatannya di dalam berbagai aksi pemboman, Baasyir dan pengikutnya menolak dan mengingkari bahwa ia adalah pimpinan JI. Sebaliknya, dia mengakui bahwa dia hanyalah pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI); dia menegaskan bahwa MMI tidak sama dengan JI, dan bukan pula merupakan bagian dari JI.

Baasyir memang membingungkan banyak pihak. Banyak kalangan publik mengetahui, bahwa bersama Abdullah Sungkar, kawan lamanya, Baasyir mendirikan organisasi al-Jamaah al-Islamiyah. JI yang mereka dirikan tentunya berbeda dengan istilah *Jama'ah Islamiyah* yang secara generik berarti masyarakat Muslim secara umum. Tetapi, JI yang dibentuk Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir merupakan organisasi khusus dengan kepemimpinan, struktur, dan keanggotaan tertentu bagi mereka yang tertarik untuk masuk ke dalamnya.

Juga jelas bahwa JI pimpinan Abdullah Sungkar semula hampir tidak dikenal masyarakat Muslim Asia Tenggara umumnya atau di Indonesia dan

⁴Tentang JI, lihat ICG (International Crisis Group), *Indonesian Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Networks Operates* (Jakarta/Brussel: ICG, Desember 2002); ICG (International Crisis Group), *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the "Ngruki Network" in Indonesia* (Jakarta/Brussel: ICG, August 2002); Nasir Abbas, *Membongkar Jemaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005). Untuk pembelaan Abu Bakar Baasyir lihat bukunya, *Catatan dari Penjara untuk Mengamalkan dan Menggakkah Dinul Islam* (Depok: Mushaf, 2006); *Saya Difatnah* (Jakarta: Qalamas, 2006).

Malaysia khususnya. Bahkan adalah kenyataan pula, baik Sungkar maupun Baasyir tidak begitu dikenal dalam dinamika pergerakan Islam di Indonesia sebelumnya. Hanya setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, khususnya setelah Presiden George W Bush mendeklarasikan perang melawan terorisme, nama JI sebagai organisasi teroris mulai menarik perhatian publik. Itulah sebabnya mengapa banyak di antara masyarakat Muslim di Asia Tenggara kemudian merasa skeptis dengan keberadaan JI. Bagi mereka, JI hanyalah sebuah organisasi bayangan yang dibuat intelijen Amerika Serikat untuk mendiskreditkan Islam dan Muslim.

Harus diakui, sangat sulit menilai secara persis dinamika dan struktur organisasi seperti JI, karena asal dan sifatnya yang merupakan organisasi tersembunyi, yang bergerak di bawah tanah. Namun, berdasarkan catatan kepolisian, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari organisasi JI ini. Organisasi ini dipimpin seorang *amīr* yang dibantu sejumlah wakil pimpinan pada tingkat daerah (*mantiqi*) yang kemudian memiliki masing-masing wakil yang langsung mengatur para anggota. Pada umumnya anggota tidak pernah berhubungan langsung dengan *amīr*; bahkan sangat boleh jadi para anggota pada tingkat akar rumput tidak mengetahui siapa yang menjadi *amīr* tertinggi. Hal ini mudah dipahami, karena cara kerja organisasi semacam ini terbentuk dalam sistem jaringan yang boleh jadi tidak mengenal satu sama lain. Setiap jaringan tampaknya tidak mengetahui keberadaan jaringan lain, dan setiap jaringan dapat beroperasi secara independen.

Menurut sebuah laporan, Abdullah Sungkar yang memimpin JI pernah direkrut beberapa jenderal ABRI yang dekat dengan Presiden Soeharto. Bersama dengan Abu Bakar Baasyir, Sungkar direkrut Haji Ismail Pranoto (Hispran) untuk masuk gerakan NII pada pertengahan 1970-an. Sementara Hispran dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 1978 atas keterlibatannya di dalam Komando Jihad, Sungkar dan Baasyir pada awal 1980-an mampu mendirikan kelompok NII pimpinan mereka sendiri yang menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta⁵

Dengan demikian, kelompok Islam politik radikal tertentu di Indonesia memiliki keterkaitan dengan DI/TII di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo yang pada 1950-an melakukan pemberontakan melawan Republik Indonesia. Meskipun militer Indonesia saat itu berhasil membasmi pemberontakan yang bertujuan mendirikan NII, banyak di antara anggota DI/TII dulu itu berhasil

⁵Muh Nursalim, "Faksi Abdullah Sungkar dalam Gerakan NII Era Orde Baru," Tesis MA, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

bertahan hidup selama beberapa kurun waktu, bahkan beberapa di antara mereka masih hidup hingga kini⁶.

Meskipun mereka mampu bertahan, ketiadaan seorang pemimpin yang kuat menyebabkan perpecahan di kalangan mantan anggota DI/TII. Selain itu, perubahan strategi di antara mereka, apakah akan terus menggunakan pendekatan radikal seperti kekerasan dan pemberontakan, atau menerapkan pendekatan damai dalam usaha mereka mendirikan sebuah Negara Islam di Indonesia memperburuk perpecahan dan konflik yang terus berlanjut bahkan hingga saat ini.

Salah satu kelompok eks-DI/TII atau anggota NII yang disebut-sebut melanjutkan pendekatan terorisme adalah Komando Jihad, yang melakukan sejumlah aktivitas teror pada 1970-an, di antaranya penyerangan kantor polisi di Bandung dan pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Bangkok. Tidak banyak hal yang diketahui tentang kelompok yang disebut sebagai Kelompok Warman. Tetapi, kecurigaan berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia bahwa kelompok radikal ini terdiri dari mantan anggota DII/TII atau anggota NII yang direkrut beberapa jenderal di lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan menghasut mereka melakukan kegiatan kekerasan dan terorisme, Islam dapat didiskreditkan dan akhirnya memberikan justifikasi kepada militer Indonesia untuk menguasai dan mengendalikan Islam dan Muslim.

Sekali lagi, melihat aktivitas Sungkar dan Baasyir pada masa Soeharto jelas keduanya tidak mungkin melakukan kekerasan dan kegiatan terorisme. Namun demikian, mereka memilih untuk mengkritik pedas pemerintahan Soeharto. Secara umum, mereka menentang kebijakan Soeharto; hal inilah kemudian yang menyebabkan mereka ditahan di balik jeruji penjara selama empat tahun pada 1978. Bebas dari tahanan pada 1982, Sungkar dan Baasyir melanjutkan perjuangan mereka melawan Soeharto dengan membentuk apa yang disebut dengan kelompok *usrah* (secara literal berarti keluarga) sebagai usaha mereka untuk mendirikan NII. Pada 1986, rezim Soeharto menahan sejumlah pimpinan *usrah* dengan tuduhan melakukan tindakan subversif; namun Sungkar dan Baasyir berhasil melarikan diri ke Malaysia. Di negara jiran inilah, mereka hidup selama 15 tahun dan kembali ke Indonesia pada 1999 setelah kejatuhan rezim Soeharto.

Salah satu kelompok NII terdahulu lainnya adalah kelompok NII KW 9 yang dipimpin Abu Toto yang bernama asli AS Panji Gumilang. Tidak ada

⁶Ausop, "NII: Ajaran dan Gerakan (1992-2002)"; Makruf & Jahroni (ed.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*; International Crisis Group (ICG), *Indonesia Background: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix* (Southeast Asia/Brussel: ICG, September 2004).

yang mengetahui secara pasti apakah kelompok ini meninggalkan gagasan NII atau tidak; namun jelas kelompok ini memilih jalan damai dengan aktivitas dakwah, terutama pendidikan. Panji Gumilang menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat Muslim, karena mendirikan Pondok Pesantren al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, yang terkenal karena kemegahan bangunannya yang spektakuler. Dengan segera ia dituduh kalangan Muslim tertentu menyebarkan ajaran menyimpang di pesantren tersebut. Investigasi pihak berwenang dan Badan Penelitian Departemen Agama Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada penyimpangan dari ajaran Islam di dalam Pesantren al-Zaytun, baik dalam segi akidah maupun praktik keagamaan.

Pemberdayaan Kaum Moderat

Sekarang ini saat yang tepat bagi para pemimpin Muslim Asia Tenggara secara umum, khususnya lagi Indonesia, untuk menyadari bahwa ada masalah radikalisme yang serius di antara individu dan kelompok Muslim tertentu. Masalah ini haruslah ditanggapi secara bijaksana oleh para pemimpin moderat secara bersama-sama dengan para penegak hukum. Inilah upaya yang tepat mempertahankan wajah Islam sebagai agama damai dan demi kepentingan Muslim Indonesia dan Asia Tenggara sebagai “masyarakat Islam yang damai”. Jelas, radikalisme ini dapat dilihat pada dua level; pertama, kekerasan dan manipulasi untuk membenarkan radikalisme dan terorisme dengan mengutip doktrin-doktrin Islam tertentu. Tidak ragu lagi, kekerasan dapat muncul karena interpretasi secara literal terhadap Islam. Kedua, penggunaan kekerasan dan terorisme jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam.

Karena itu, sekarang saat yang tepat bagi para pemimpin Muslim moderat untuk berbicara lebih jelas dan lantang bahwa interpretasi secara literal terhadap Islam hanya menghasilkan ekstrimisme, dan itu tidak dapat diterima dan ditoleransi nilai-nilai Islam. Tidak ada alasan apapun bagi setiap Muslim untuk melakukan tindakan pengrusakan atau pembunuhan pihak lain, baik dari kalangan Muslim atau non-Muslim. Berbagai macam kebencian dan kemarahan yang dirasakan individu dan kelompok Islam manapun tidak seharusnya dibalas dengan keputusan dan berbagai bentuk sikap tidak manusiawi.

Lebih jauh lagi, tidak semestinya para pemimpin Muslim moderat terkecoh anggapan dan pernyataan para kaum radikal. Mereka sangat cerdik dalam menyalahgunakan doktrin-doktrin keislaman demi kepentingan mereka sendiri; dan memanipulasi masyarakat Muslim dengan penyalahgunaan dan manipulasi media massa, khususnya media televisi. Pernyataan mereka, bahwa penangkapan para pemimpin radikal merupakan penindasan terhadap Islam dan ulama, adalah pernyataan yang menyesatkan. Sama halnya dengan pernyataan yang mengatakan bahwa penyelidikan polisi di Indonesia terhadap pesantren

tertentu dalam rangka pencarian pelaku pengeboman merupakan sikap permusuhan dan kecurigaan terhadap seluruh pesantren.

Penyelidikan yang dilakukan kepolisian terhadap para pemimpin radikal dan kelompok-kelompok Islam, ulama sebagai penindasan terhadap Islam, jelas juga merupakan pernyataan menyesatkan. Hal ini karena kaum radikal hanyalah merupakan pecahan kecil jika dibandingkan dengan Muslim moderat merupakan wajah asli Islam Indonesia dan Asia Tenggara. Karena itu, para moderat semestinya berhati-hati untuk tidak memunculkan kesan apapun yang dapat berakibat kepada kecurigaan terhadap kaum Muslim umumnya.

Sebagian pengamat asing beranggapan bahwa sikap pembelaan para pemimpin Muslim moderat khususnya di Indonesia berasal dari pengalaman trauma atas politisasi dan manipulasi yang dilakukan polisi dan militer di masa Soeharto. Pendapat ini tidak relevan dengan situasi politik Indonesia pasca Soeharto. Tidak ada bukti bahwa pemerintahan pasca Soeharto memusuhi Islam dan Muslim. Pada kenyataannya, Presiden Megawati Soekarnoputri, misalnya, sangat peduli pada isu-isu Muslim dibandingkan dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan mendapat dukungan yang relative tidak solid dari masyarakat Muslim, Presiden Megawati Soekarnoputri berusaha menahan diri dalam membuat pernyataan-pernyataan tentang Islam. Hal ini juga berlaku pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki kedekatan dengan kelompok Muslim dan membangun kerjasama politik dengan partai-partai Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain.

Namun, tentu saja banyak kritik yang pernah ditujukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri yang sering dianggap ragu-ragu dan tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap kaum radikal. Ini karena kekhawatirannya akan kemungkinan terjadinya reaksi balik (backlash) dari masyarakat Muslim. Dalam hal ini, terlihat bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menyadari bahwa para pemimpin Muslim moderat dan organisasi-organisasi Islam ingin berada di belakang Megawati dalam menentang segala bentuk radikalisme dan ekstrimisme agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasyim Muzadi, Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) dan Syafii Maarif, Ketua PP Muhammadiyah yang menegaskan bahwa sejak terjadinya serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, masyarakat Islam Indonesia tidak dapat menerima segala bentuk ekstrimisme agama. Lebih jauh lagi, dua organisasi Islam terbesar ini yang mewakili puluhan juta Muslim Indonesia bersepakat menangani permasalahan radikalisme agama melalui berbagai macam kebijakan.

Karena itu, para pemimpin Muslim moderat semestinya mendukung aparat penegak hukum untuk mengadili para pelaku terorisme. Saya

berpendapat bahwa salah satu penyebab penting aksi-aksi terorisme dan kekerasan di Indonesia pada masa reformasi adalah karena hamper tidak adanya penegakan hukum; dan lebih parah lagi disebabkan terlalu longgarnya hukum di Indonesia. Adanya vakum dalam penegakan hukum dan sikap tidak tegas kepolisian tersebut merupakan *raison d'être* bagi kelompok-kelompok radikal tertentu untuk mengambil alih hukum melalui aktivitas-aktivitas ilegal seperti *swearing* diskotik, klub malam, dan tempat-tempat lain yang mereka anggap sebagai sarang berbagai penyakit sosial.

Masa depan Islam Indonesia yang moderat dan damai sangat tergantung pada sikap adil, obyektif dan proaktif dari mayoritas masyarakat moderat dalam meresponi berbagai perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Tindakan kekerasan jelas tidak membantu upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama damai dan bahwa Muslim mencintai sesama manusia. Sekarang adalah saat yang tepat bagi kaum moderat untuk lebih aktif untuk mengarahkan masyarakat kepada revitalisasi Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.

Penutup

Mungkin sangat klise untuk mengatakan bahwa Islam di Indonesia dan Asia Tenggara merupakan Islam yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah dan bagian dunia yang lain, baik dari segi ekspresi sosial, budaya, politik dan keberagaman. Islam di Indonesia dan Islam di Asia Tenggara pada 1990-an mendapat penilaian dari media internasional terkemuka seperti Majalah *Newsweek* dan *Time* sebagai *'Islam with a Smiling Face'* (Islam dengan Wajah Tersenyum). Islam di kedua wilayah tersebut mendapatkan predikat sebagai Islam yang moderat dan damai, yang tidak memiliki masalah dengan modernitas, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan jender, dan isu-isu lain pada masa modern kontemporer. Kini saatnya *'Islam with a Smiling Face'* itu tampil kembali.

Daftar Pustaka

- Ausop, Asep Zainal. "NII: Ajaran dan Gerakan (1992-2002)." Disertasi, PPS UIN Jakarta, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Indonesia, Islam and Democracy; Dynamics in Global Context*. Jakarta & Singapore: Solstice-Equinox, ICIP & the Asia Foundation, 2006.
- , *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. Crownest, Aust., Honolulu, Leiden: AAAS & Allen & Unwin; University of Hawaii Press; KITLV Press, 2004.

- , "The Megawati Presidency: The Challenge of Political Islam." Dalam Hadi Soesastro, Anthony L. Smith & Han Mui Ling (eds.), *Challenges Facing the Megawati Presidency*. Singapore: ISEAS, 2003.
- , "Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths." Dalam Kumar Ramakrishna & See Seng Tan (ed.), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapore: World Scientific & IDSS, 2003.
- , "The Globalization of Indonesian Muslim Discourse: Contemporary Religio-Intellectual Connections between Indonesia and the Middle East." Dalam Johan Meuleman (ed.), *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. London: Routledge Curzon, 2002, 31-50.
- , *Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- , "The Islamic Factor in Post-Soeharto Indonesia." Dalam Chris Manning & Peter van Diermen (ed.), *Indonesia in Transition: Social Aspect of Reformasi and Crisis*. Canberra & Singapore: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University & Institute of Southeast Asian Studies, 2000, 309-19.
- Bamualim, Chaider S, et al. *Laporan Penelitian Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2001.
- Benda, Harry J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*. The Hague & Bandung: van Hoeve, 1958.
- Fananie, Zainuddin, Atika Sabardila & Dwi Purnanto. *Radikalisme Agama & Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation, 2002.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Modern Indonesia Project, 1970.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. New York: The Free Press, 1968 orig. New Haven & London: Yale University Press, 1960.
- ICG (International Crisis Group). *Indonesia Background: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix*. Southeast Asia/Brussel (September, 2004).
- , *Indonesia Background: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Networks Operates*. Jakarta/Brussel (December 2002).
- , *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the "Ngruki Network" in Indonesia*. Jakarta/Brussel (August 2002).
- , *Indonesia: Violence and Radical Muslim*. Jakarta/Brussel (October 2001).

- Jamhari & Jahroni, Jajang (ed.). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nursalim, Muh. "Faksi Abdullah Sungkar dalam Gerakan NII Era Orde Baru," *Tesis MA*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.
- Reid, Anthony. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*. New Haven & London: Yale University Press, 1988 (Vol I); 1993 (Vol. II).
- Ricklefs, M.C. *The Seen and the Unseen Worlds in Java: History, Literature and Islam in Court of Pakubuwana II, 1726-1749*. Canberra: AAAS & Allen Unwin, 1998.
- Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: The University of Arizona Press, 1989.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.